



# Saksi Kasus UPS Serahkan Duit Rp 1,5 Miliar Ke Polisi

JAKARTA — Seorang saksi kasus dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya, kemarin. "Uang tunai, bukan dari buku rekeningnya," tutur Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Mujiono, di kantornya, kemarin.

Namun Mujiono masih merahasiakan siapa saksi yang menyerahkan uang itu. Menurut dia, duit itu kini menjadi barang bukti dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2014 ini. "Belum bisa disebut namanya karena masih penyidikan," ujar dia.

Dalam pantauan *Tempo*, pada Selasa lalu, polisi memeriksa Direktur CV Sari, Bunbunan Yunus Marpaung. Perusahaan ini merupakan salah satu pemenang tender pengadaan alat penyimpan daya sementara ke sekolah-sekolah di Jakarta. Saksi lainnya yang datang adalah Alex Usman, bekas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta Barat. Alex merupakan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan UPS. Baik Yunus maupun Alex belum bisa dimintai konfirmasi hingga berita ini turun.

Polisi melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi kemarin. Yang memenuhi panggilan adalah bekas Kepala Dinas Pendidikan DKI, Lasro Marbun; Ibnu Hajar dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat; Rani Nurani, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan; dan Saryono,

Kepala SMA 112 Jakarta Barat.

Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Martinus Sitompul, menuturkan, setelah peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, polisi memanggil 21 saksi untuk diperiksa. Namun, kata dia, hanya 11 orang yang datang. "Yang tidak hadir delapan perusahaan penyedia jasa dan dua pejabat pemeriksa hasil pekerjaan," ujar dia. "Nanti akan kami layangkan pemanggilan kedua kepada saksi yang tidak hadir."

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengungkap dugaan adanya penggelambungan dana dalam kaitan dengan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit pada 2014. Padahal, ia mengatakan harga UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere (KVA) hanya sekitar Rp 100 juta. Ahok—sapaan Basuki—merasa kecolongan atas pembelian itu. Ia kemudian melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun polisi, yang mengaku mendapat laporan dari masyarakat sejak Januari 2015, lebih cepat mengusut kasus ini. Bahkan, mereka kini sudah mengantongi calon tersangka. "Sudah ada," kata Kepala Sub-Direktorat Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Aju Komisaris Besar Adji Indra, Selasa lalu. Namun Adji tak mau membocorkan nama calon tersangka itu karena pihaknya masih terus menyidik kasus ini. ● AFRILIA SURYANIS